

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2014-2017**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

RETNO HAPSARI

NIM : 2015310616

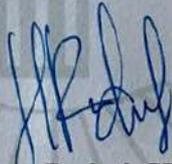
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Retno Hapsari
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 4 Januari 1997
N.I.M : 2015310616
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal:



Agustina Ratna Dwiati, SE., MSA

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal:



Dr. Nanang Shonhadji, S. E., Ak., M. Si., CA., CIBA., CMA

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2014-2017**

Retno Hapsari

STIE Perbanas Surabaya

Email: retnohapsari04@gmail.com

ABSTRACT

This research is an empirical study on manufacture sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. The objective of the research is to analyze and to measure the effect of institutional ownership structure, managerial ownership structure, board commissioners and audit committee on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) activities. Data were collected using purposive sampling technique. Multiple linear regression was used to analyze the data, applying SPSS 25. This study found that board commissioners size has a positive effect on disclosure of corporate social responsibility. However, institutional ownership structure, managerial ownership structure and audit committee size did not effect on disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR).

Key Word : *Institutional Ownership Structure, Managerial Ownership Structure, Board Commissioners, Audit Committee, Disclosure Of CSR.*

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan ketiga 2018 sebanyak 16 perusahaan meningkat sebesar 4,36 persen dan sebanyak 7 perusahaan mengalami penurunan sebanyak 1,32 persen. Indikasi keberadaan industri semakin tahun semakin banyak jumlahnya ternyata menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif yaitu perusahaan dapat menjadi wadah mata pencaharian dan sumber pendapatan bagi masyarakat sedangkan dampak negatif yaitu masalah kerusakan lingkungan akibat pencemaran dari

aktivitas industri seperti cerobong asap yang dapat menyebabkan polusi serta adanya limbah pabrik yang membuat sungai menjadi beracun. Kerusakan ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran diri perusahaan akan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial lingkungan dimana perusahaan berada. Beberapa perusahaan hanya berorientasi pada laba untuk menunjukkan performa kinerjanya kepada para investor, sehingga kadang kala banyak perusahaan yang tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, tanpa menyadari bahwa peran lingkungan sekitar sangat

mempengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* dapat disimpulkan sebagai suatu gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu terkait dengan masalah sosial dan lingkungan. Penerapan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan pengungkapan CSR yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan (Fahry Maulana, 2013). Dalam CSR hal-hal yang diungkapkan antara lain meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan dilakukan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor atau stakeholders (Gusti Ayu, 2015).

Adapun aturan-aturan yang mengatur tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tertera di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam dan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meski landasan hukum praktik CSR dan pengungkapannya cukup kuat, pelaksanaan CSR perusahaan publik masih bervariasi, dari yang berkinerja CSR baik sampai yang melanggar praktik CSR. Beberapa perusahaan publik yang memiliki kinerja CSR baik dan mendapatkan penghargaan pada Indonesia Social Responsibility Awards (ICSRA) II tahun 2018 yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Indofood Sukses. Sedangkan beberapa kasus pelanggaran terkait dengan

tanggungjawab lingkungan yaitu terjadi pada PT Toba Pulp Lestari Tbk dimana perusahaan di tuntut oleh warga karena dianggap melakukan pencemaran lingkungan sehingga merugikan banyak warga sekitar. Pelanggaran tersebut mulai dari pencemaran udara yang mengganggu pernapasan warga hingga limbah yang dibuang di sungai dan melebihi standar sehingga menyebabkan warga banyak yang menderita sakit (medan.tribunnews.com, 2018).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori agensi. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. Pengaplikasian *agency theory* dapat terwujud dalam sebuah kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Kontrak kerja menjadi optimal apabila dalam pelaksanaan kontrak dapat *fairness* (mencapai keadilan) antara *principal* dan *agen* yang memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif imbalan khusus yang memuaskan dari *principal* ke agen (Scot William R, 2012).

Ada empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pertama yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Berdasarkan

teori agensi, perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen mengakibatkan timbulnya konflik. Kepemilikan institusional yang lebih tinggi menandakan tanggungjawab perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan semakin tinggi pula. Sehingga pihak manajemen akan termotivasi untuk melaporkan seluruh kegiatan perusahaan, serta tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atas aktivitas yang telah dilakukan dalam sebuah laporan CSR. Penelitian dari Acep Edison (2014) memaparkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian dari Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013) memaparkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel yang kedua yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007:2). Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara pihak manajer dan pihak pemegang saham akan menimbulkan konflik. Kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh pihak manajer perusahaan lebih tinggi hal itu akan mengurangi konflik, dikarenakan manajer yang berperan sebagai pemegang saham akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Salah satu cara untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas perusahaan yaitu dengan membuat laporan CSR. Kepemilikan saham manajerial yang tinggi juga membuat manajer dapat membuat keputusan sehingga dapat memakmurkan pemegang saham tidak lain untuk kepentingannya sendiri. Penelitian dari Acep Edison (2014) memaparkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan

penelitian dari Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013) memaparkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel yang ketiga yaitu dewan komisaris. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris adalah untuk mengawasi seluruh aktivitas di perusahaan, sehingga semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka akan mengurangi konflik yang ada diantara pemegang saham dan pihak manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris membuat pihak manajemen dapat meningkatkan kinerjanya dengan melaporkan informasi secara lengkap mengenai aktivitas dan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui CSR. Penelitian dari Aurellia Adi Leksono dan Sansalono Butar Butar (2018) memaparkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian dari Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013) memaparkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel yang ke empat yaitu komite audit. Menurut Hiro Tugiman (1995) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Tugas dari komite audit dalam perusahaan yaitu membantu dewan

komisaris mengawasi aktivitas perusahaan. Sehingga semakin tinggi jumlah anggota komite audit akan membuat pihak manajemen dapat meningkatkan kinerjanya dengan melaporkan informasi secara lengkap mengenai aktivitas dan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui CSR. Penelitian dari Aurellia Adi Leksono dan Sansalono Butar Butar (2018) memaparkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan penelitian dari Dwi Arini dan Zulaikha (2013) memaparkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. Pengaplikasian *agency theory* dapat terwujud dalam sebuah kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mekanisme bagi hasil, baik berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang telah disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja menjadi optimal apabila dalam pelaksanaan kontrak dapat *fairness* (mencapai keadilan) antara *principal* dan agen yang memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif imbalan

khusus yang memuaskan dari *principal* ke agen (Scot William R, 2012).

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai identitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. GCG merupakan sistem yang dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR. Penerapan GCG pada perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu *Transparancy*. Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Corporate Social Responsibility

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang

dapat digunakan untuk mendukung keberadaan manajemen.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007). Kepemilikan manajerial diproksikan dengan rumus jumlah saham manajerial dari total saham yang beredar.

Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Menurut Sembiring (2005) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris.

Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman (1995) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Pengukuran komite audit menggunakan jumlah komite audit.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Corporate Social Responsibility

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Menurut Mursalim (2007), kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses pengawasan.

Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena investor institusional berbentuk badan atau institusi sehingga memiliki pendanaan yang besar. Semakin besar jumlah kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan untuk melaporkan semua informasi secara lengkap tidak hanya terkait keuangan namun juga terkait bagaimana tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya. Dengan mengungkap laporan CSR maka perusahaan dapat bersifat lebih transparan kepada stakeholders sehingga dapat mempertahankan keberadaan stakeholder. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap corporate social responsibility

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Corporate Social Responsibility

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011). Pihak manajerial adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga - tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam rapat umum

pemegang saham. Ketiga, hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah keagenan (Naila Karima, 2014). Konflik di dalam perusahaan terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajer perusahaan. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Peningkatan atas kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan membuat kekayaan manajemen secara pribadi semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya dan akan lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan.

Seorang manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen yaitu dengan mengungkapkan pelaporan CSR. Pengungkapan laporan CSR akan membuat keberadaan perusahaan akan diterima masyarakat sehingga dapat membawa dampak baik bagi keberlangsungan perusahaan jangka panjang sehingga dapat menguntungkan perusahaan sekaligus pemegang saham. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*

Pengaruh dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility*

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan

komisaris yang dimiliki dalam perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam mengawasi aktivitas manajemen secara efektif (Sembiring, 2005). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Collier dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Sehingga dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka pihak manajemen perusahaan akan terdorong untuk lebih transparan dan mengungkapkan informasi secara lengkap terkait aktivitas perusahaan serta dampak dan tanggungjawab yang akan dilakukan oleh perusahaan melalui laporan CSR. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*

Pengaruh komite audit terhadap *corporate social responsibility*

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari GCG di perusahaan-perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu kinerja dewan komisaris dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang timbul antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Ho dan Wong (2001) juga menjelaskan bahwa komite audit adalah sebuah proses

tata kelola untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen sehingga manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan dan turut meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Pendirian komite audit diyakini mampu menekan asimetris informasi, peluang manajemen dalam berbuat curang, dan meningkatkan kualitas dari pengungkapan. Dengan demikian semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan

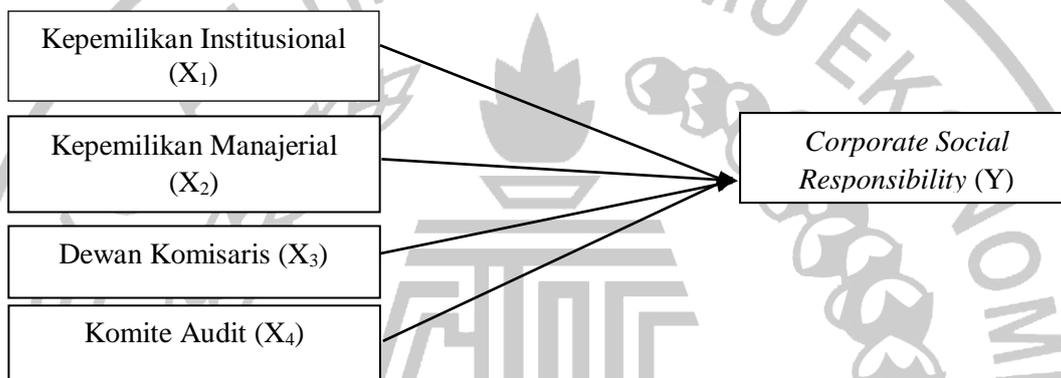
tanggung jawab sosial juga semakin baik (Teddy Jurnal, 2015).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah yang industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini dilakukan pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.
2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan tahunan di BEI atau di web masing-masing perusahaan.
3. Perusahaan mengungkapkan laporan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan.

Terdapat sebanyak 572 perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Data Penelitian

Data pada penelitian ini adalah data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data *purposive sampling* yang sesuai dengan konsep penelitian. Data laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan tahun 2014-2017 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu *corporate social responsibility* dan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit

Definisi Operasional Variabel *Corporate Social Responsibility*

Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yakni merupakan suatu proses pengkomunikasian dari adanya dampak sosial dan lingkungan akibat keberadaan kegiatan ekonomi organisasi terhadap masyarakat. CSR tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup bagi semua orang baik bagi pekerja, keluarga dan organisasi. Informasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) terdiri dari enam kategori yang diadopsi dari *Indeks Global Reporting Initiative* (GRI) yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggung jawab produk. Total indeks yang terdapat pada GRI-G4 ada 91 item. Rumus *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\sum X_i}{N}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Rumus untuk mengukur kepemilikan institusional:

$$KI = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola.

Rumus untuk mengukur kepemilikan manajerial :

$$KM = \frac{\text{jumlah saham manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, jumlah tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan tolak ukur asset dalam menentukan ukuran perusahaan.

Rumus dewan komisaris :

$$DK = \text{Jumlah Dewan Komisaris}$$

Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman (1995) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Rumus untuk mengukur komite audit yaitu :

$$KA = \text{Jumlah komite audit}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif yang diolah dengan teknik statistik menggunakan *software* SPSS 23, melalui tahapan analisis deskriptif dan uji hipotesis. Dimana tahapan dari uji hipotesis adalah :

- Analisis statistik deskriptif
- Uji Asumsi Klasik
- Uji Hipotesis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atas variabel

independen suatu penelitian, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 pada variabel

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| CSR | 572 | 0.010 | 0.61538 | 0.18035 | 0.08452 |
| KI | 572 | 0.000 | 0.9417 | 0.61790 | 0.28054 |
| KM | 572 | 0.000 | 0.8733 | 0.06409 | 0.16496 |
| DK | 572 | 1 | 12 | 4.24 | 1.824 |
| KI | 572 | 1 | 7 | 3.09 | .513 |

Berdasarkan tabel 1 pada variabel CSR dapat dilihat bahwa nilai tertinggi 0.61538 yang dimiliki oleh PT. Indofarma Tbk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini melakukan pengungkapan indikator CSR lebih banyak dari perusahaan-perusahaan lain dalam sektor industri manufaktur. Jumlah CSR yang terendah dimiliki oleh PT. Multi Prima Tbk dengan nilai 0.010 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. PT. Multi Prima Tbk yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. PT. Multi Prima Tbk hanya mengungkapkan indikator yang berfokus pada praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak serta penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan nilai rata-ratanya, nilai CSR dalam penelitian ini sebesar 0,18 atau 18%. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor industri manufaktur mencapai kurang dari 50%, yang berarti bahwa perusahaan sektor industri manufaktur dalam mengungkapkan CSR belum terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk standart deviasi sebesar 0,08 atau 8%.

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank,

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 0,9417. Rasio kepemilikan institusional yang besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut mampu memonitor manajemen dengan baik sehingga perilaku oportunistik dapat ditekan seminimal mungkin sehingga pihak manajemen terdorong untuk lebih transparan dalam hal pengungkapan *Corporate Sosisl Responsibility (CSR)*. Sedangkan rasio kepemilikan institusional yang terendah adalah 0. Nilai standart deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,28054.

Pada tabel 1 pada variabel kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dari tabel kepemilikan manajerial perusahaan industri manufaktur dapat dilihat bahwa kepemilikan manajerial tertinggi adalah dengan kepemilikan presentase 0,8733 dan yang

terendah adalah dengan kepemilikan persentase 0. Dari hasil pengamatan tabel kepemilikan manajerial, kepemilikan saham oleh manajerial menunjukkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yaitu dewan komisaris, komite audit atau direktur perusahaan. Variabel kepemilikan saham manajerial yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan yang menunjukkan nilai sebesar rata-rata sebesar 0,06409 yang dapat menjelaskan bahwa kurang dari 50% saham yang dimiliki oleh perusahaan adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Nilai untuk standar deviasi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,16496.

Berdasarkan tabel 1 pada variabel dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Dari tabel dewan komisaris perusahaan industri manufaktur tahun 2014-2017 dapat dilihat bahwa komposisi dewan komisaris tertinggi adalah pada PT Astra Internasional Tbk tahun 2017 dengan jumlah dewan komisaris sebanyak 12 orang dan yang terendah adalah PT Hartadinata tahun 2016 dan PT Prima Cakrawala tahun 2016 dengan jumlah dewan komisaris sebanyak 1 orang. Rata – rata jumlah dewan komisaris perusahaan industri manufaktur tahun 2014-2017 yaitu 4,24 dengan standart deviasi 1,824.

Berdasarkan tabel 2 pada variabel komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab membantu tugas serta fungsi dewan komisaris itu sendiri. Dari tabel komite audit perusahaan industri manufaktur tahun 2014-2017 dapat dilihat bahwa komposisi komite audit tertinggi adalah pada PT Kimia Farma Tbk dengan jumlah komite audit sebanyak 7 orang dan

yang terendah dengan jumlah komite audit sebanyak 1 orang. Rata – rata jumlah komite audit perusahaan industri manufaktur tahun 2014-2017 yaitu 3,09 dengan standart deviasi 0,503.

Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Apabila signifikansi pada uji kolmogorov- smirnov nilai signifikansi > 0.05 , maka menunjukkan bahwa data terdistribusi normal yang menandakan bahwa H_0 diterima, sedangkan jika uji kolmogorov- smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0.05 maka data tidak terdistribusi normal yang menandakan bahwa H_0 ditolak.

**Tabel 2
Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | |
|------------------------------------|-------------------------|
| | Unstandardized Residual |
| N | 572 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.067 |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Hasil dari tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya nilai kolmogorov-smirnov dengan signifikansi sebesar 0.067 yang menandakan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang artinya bahwa H_0 diterima sedangkan H_a ditolak. Kesimpulan dari uji normalitas kolmogorov-smirnov adalah data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah diantara variabel bebas

(independen) dalam penelitian terdapat korelasi atau tidak. Menurut Ghazali (2013:105) nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10.

Table 3

Tabel Uji Multikolinieritas

| Model | | Coefficients ^a | |
|-------|----|---------------------------|-------|
| | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | KI | .780 | 1.282 |
| | KM | .786 | 1.272 |
| | DK | .928 | 1.078 |
| | KA | .915 | 1.093 |

Berdasarkan hasil pertimbangan tolerance yang pada tabel 3 juga menunjukkan bahwa hasil pengujian multikolinearitas dari masing-masing variabel adalah tidak terjadi adanya multikolinearitas. Hal ini disebabkan karena seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance sebesar > 0.10 dan $VIF < 10$ yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 4

Uji Autokorelasi

| Model Summary | |
|---------------|---------------|
| Model | Durbin Watson |
| 1 | 2.021 |

Berdasarkan tabel Durbin-Watson akan didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1.84901 dan diperoleh nilai batas

atas (dU) sebesar 1.87094. Apabila nilai $dw > dU$ maka tidak terjadi autokorelasi positif dan jika $(4 - dw) > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Pada penelitian ini $2,021 > 1,87094$ dan $1,979 > 1,87094$ maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga dapat dikatakan tidak terjadi adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dalam suatu penelitian dapat dikatakan baik bila tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang dapat dilakukan dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini yakni dengan uji gletser. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig) > 0.05 maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan bila nilai signifikansi (Sig) < 0.05 maka menunjukkan terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5

Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Sig | Keterangan |
|----------|-------|---------------------------------|
| KI | 0,240 | Bebas heteroskedastisitas |
| KM | 0,792 | Bebas heteroskedastisitas |
| DK | 0,000 | Tidak bebas heteroskedastisitas |
| KA | 0,082 | Bebas heteroskedastisitas |

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa ada variabel independen yang menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu variabel dewan komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Sig. |
|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|------|
| | | B | Std. Error | |
| 1 | (Constant) | 14,918 | 2,538 | ,000 |
| | Kepemilikan Institusional | -,023 | ,014 | ,093 |
| | Kepemilikan Manajerial | -,012 | ,023 | ,764 |
| | Dewan Komisaris | 1,337 | ,193 | ,000 |
| | Komite Audit | -,341 | ,690 | ,621 |

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$CSR = 14,918 + 1,337 (DK) + e$$

a. Berdasarkan persamaan regresi diatas jika semua variabel dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka nilai CSR sebesar 14,918.

b. Koefisien variabel dewan komisaris yakni sebesar 1,337 yang artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan unit dewan komisaris akan menaikkan nilai CSR sebesar koefisien regresi dewan komisaris 1,337 dengan asumsi variabel bebas selain dewan komisaris dianggap konstan (tidak berpengaruh).

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Statistik F)

Uji statistik F atau uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Selain itu uji F juga

dapat digunakan untuk mengetahui fit atau tidaknya model regresi yang diujikan.

Tabel 7
Hasil Uji F

| Model | F | Sig. |
|------------|--------|-------------------|
| Regression | 13.634 | .000 ^b |

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai F yang dari hasil penelitian yakni sebesar 13,634 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Dari tabel 7 tampak bahwa nilai signifikansi yang ditunjukkan jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diujikan adalah fit dan variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Kemampuan tersebut diukur dengan menggunakan nilai R² yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$. Kemampuan model dapat dinyatakan semakin baik jika nilai adjusted R² yang dihasilkan mendekati angka 1. Hasil dari uji koefisien determinasi terhadap model regresi pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji R²

| Model Summary | | |
|---------------|----------|-------------------|
| Model | R Square | Adjusted R Square |
| 1 | .088 | .081 |

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang tampak dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* yakni sebesar 0.081 yang artinya bahwa variabel-variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabilitas dari variabel pengungkapan CSR yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit adalah sebesar 6,7% dan sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam model regresi.

Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen pengungkapan CSR terhadap variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit. Pengambilan kesimpulan ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig. t dengan taraf signifikansi α sebesar 5% atau 0.05. Kesimpulan H1 ditolak jika nilai sig. > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa H1 diterima sedangkan jika nilai sig. < 0.05. Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini disajikan dalam tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji t

| | Model | t | Sig. |
|---|---------------------------|--------|------|
| 1 | Kepemilikan Institusional | -1.683 | .093 |
| | Kepemilikan Manajerial | -.515 | .607 |
| | Dewan Komisaris | 6.925 | .000 |
| | Komite Audit | -.495 | .621 |

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 9 maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi pada uji t yang disajikan sebagai berikut:

1) Pengujian hipotesis pertama

Pengujian hipotesis pertama dilakukan pada variabel kepemilikan institusional, yang dimana variabel tersebut akan menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t hitung sebesar -1,683 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.093. Nilai signifikansi yang dimiliki variabel kepemilikan institusional > 0.05 yang memiliki arti bahwa H1 ditolak dan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

2) Pengujian hipotesis kedua

Pengujian hipotesis kedua dilakukan pada variabel kepemilikan manajerial dimana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung sebesar -0,515 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.607. Nilai signifikansi yang dimiliki variabel kepemilikan manajerial > 0.05 yang memiliki arti bahwa H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

3) Pengujian hipotesis ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan pada variabel dewan komisaris, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel dewan komisaris memiliki nilai t hitung sebesar 6,925 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel dewan komisaris

lebih rendah dari 0.05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

4) Pengujian hipotesis keempat
Pengujian hipotesis ketiga dilakukan pada variabel komite audit, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel komite audit terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel komite audit memiliki nilai t hitung sebesar -0,495 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,621. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel komite audit lebih tinggi dari 0.05 yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Sedangkan, dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis masing-masing variabel berikut:

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi kepemilikan institusional sebesar $0.093 > 0.05$ yang berarti bahwa jumlah kepemilikan institusional tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan H_1 ditolak. Pihak institusi kurang berperan dalam pengawasan kegiatan CSR karena orientasi dari pemilik institusional yang berupa lembaga, instansi atau perusahaan tersebut adalah berupa laba dari perusahaan yang akan berdampak langsung pada return yang akan didapat oleh pemilik institusional dari investasinya di perusahaan (Nilasari, 2015). Program *Corporate Social Responsibility* dilakukan dengan menyisihkan sebagian laba perusahaan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar perusahaan, namun sebaliknya investor tidak terlalu memperhatikan CSR karena dapat mengurangi dividen yang akan dibagikan pada investor sehingga pemasukannya berkurang (Natalia, 2011). Cahyaningsih dan Martina (2011) juga menyebutkan bahwa pihak institusi yang menanamkan sahamnya di perusahaan Indonesia masih sangat bergantung pada informasi moneter guna pengambilan keputusan, sehingga hal itu tidak mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini diketahui kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 0,9417 atau 94,17%. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan institusional, tuntutan perusahaan untuk menghasilkan laba akan semakin besar sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan efisiensi biaya termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas tanggung jawab sosialnya. Ketika pihak investor tidak melakukan pengawasan dalam pengungkapan CSR, maka pihak perusahaan tidak maksimal dalam melakukan kegiatan CSR.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013) dan Naila Karima (2014) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *corporate social responsibility*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah kepemilikan saham oleh manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi kepemilikan manajerial sebesar $0.607 > 0.05$ yang berarti bahwa jumlah kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sartono (2011) menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat dikontrol dengan beberapa mekanisme salah satunya dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial. Peningkatan jumlah kepemilikan manajerial membuat pihak manajemen tentunya akan mengutamakan kepentingan pemegang saham karena mereka juga sebagai pemegang saham. Dalam penelitian ini rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan industri manufaktur di Indonesia relatif kecil sebesar 0,06409 atau 6,409%. Menurut *theory agency* apabila jumlah kepemilikan manajerial perusahaan kecil maka tidak bisa mengurangi konflik perbedaan kepentingan diantara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan pihak manajemen tidak memiliki kewenangan penuh dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan dan membuat pihak manajemen merasa tidak memiliki perusahaan sehingga pihak manajemen belum dapat memaksimalkan pengungkapan CSR. Akibatnya pihak manajemen hanya terfokus untuk mengelola perusahaan tanpa mempertimbangkan tanggungjawab sosial dan lingkungan dari aktivitas yang ditimbulkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013), Trisnawati (2014), dan Sanjaya, Taufik, dan Azhar (2013) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi dewan komisaris sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa pada perekonomian yang modern seperti sekarang ini banyak perusahaan yang memisahkan antara pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Perusahaan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang perusahaan kepada pihak yang dianggap lebih ahli dalam mengelola perusahaan. Proses pengawasan yang baik maka diharapkan pengungkapan CSR bisa di ungkapkan lebih luas lagi, karena dapat mengurangi kemungkinan manajer dalam menyembunyikan informasi. Dewan komisaris secara terus menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat dewan komisaris disampaikan dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja direksi. Salah satu laporan yang disampaikan oleh dewan komisaris yaitu laporan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi *corporate social responsibility*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ratnasari (2011:70) bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosialnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013), Dwi Arini Untoro dan Zulaikha (2013), dan Fahry Maulana dan Etna Nur Afri Yuyetta (2014) dimana dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh komite audit terhadap *corporate social responsibility*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi komite audit sebesar $0.621 > 0.05$ yang berarti bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Tugas komite audit berdasarkan peraturan OJK Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi. Dalam peraturan OJK mengenai komite audit dapat diketahui bahwa tugas dari komite audit hanya sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan review pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan, belum memperhatikan perihal pengungkapan aktivitas CSR perusahaan. Pihak perusahaan tidak merasa terawasi dan terdorong oleh keberadaan komite audit untuk melakukan kegiatan CSR sehingga perusahaan lebih terfokus terhadap penyajian laporan keuangan

daripada pengungkapan tanggungjawab sosial.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dwi Arini Untoro dan Zulaikha (2013) dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Perusahaan ini menggunakan 572 perusahaan industri manufaktur sebagai sampel perusahaan yang telah dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada industri manufaktur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil yang tidak berpengaruh dapat ditimbulkan karena fokus dari pemilik insitusional yang berupa lembaga, instansi atau perusahaan tersebut adalah berupa laba dari perusahaan yang akan berdampak langsung pada return yang akan didapat oleh pemilik insitusional dari investasinya di perusahaan, sehingga masih kurang dalam fungsi pengawasan perusahaan dalam pengungkapan CSR.

2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Menurut

theory agency apabila jumlah kepemilikan manajerial perusahaan kecil maka tidak bisa mengurangi konflik perbedaan kepentingan diantara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial yang relatif kecil juga membuat pihak manajemen tidak merasa memiliki perusahaan dan hal tersebut membuat pihak manajemen lebih terfokus untuk meningkatkan laba daripada melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*.

4. Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak sehingga mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi CSR.

5. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Tugas dari komite audit hanya sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan review pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan, belum memperhatikan perihal pengungkapan aktivitas CSR perusahaan.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen hanya mampu menjelaskan 8,1% dari variabel dependen sehingga masih ada kemungkinan 91,9% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor lain diluar model regresi pada penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Dalam penelitian ini terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi

yaitu variabel dewan komisaris yang nilainya $< 0,05$.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel independen diluar variabel independen penelitian ini seperti variabel kinerja keuangan yang kemungkinan dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Tidak memakai variabel independen yang memiliki nilai varian yang konstan agar tidak terjadi heteroskedastisitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI
- Agoes Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta : Salemba Empat
- Akhmad Toha. 2004. "Efektivitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 8. hal. 17-41.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Aurellia Adi Leksono dan Sansaloni Butar Butar. 2018. "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social*". *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 16. No. 2.

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat , 2018. *Pertumbuhan Industri Manufaktur Di Indonesia*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Cahyaningsih, dan Venti Yustianti Martina. 2011. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial". *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol.5. No.2
- Christiawan, Yulius Yogi Tarigan, Josua. 2007. "Kepemilikan Manjerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan". *Jurnal Akuntansi dan*
- Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review". *Academy of Management*. Vol. 14. No.1. Pp. 57–74.
- Elkington, John. 1997. *Cannibals with Forks : The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing Ltd.
- Fahry Maulana dan Etna Nur Afri Yuyetta1. 2014. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3. No. 2.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics* No.26. Hal. 301 – 325
- Gusti Ayu Made Ervina dkk. 2013. Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.5. No. 3. Hal. 723
- Hiro Tugiman. 1995. *Sekilas: Komite audit*. Bandung: PT. Eresco.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Uasaha*. Jakarta : kencana.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Social Science Research Network.
- Mehran, H., 1992. "Executives Incentives Plans, Corporate Control, and Capital Structure". *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. Hal. 131-144.
- Mursalim. 2007. "Simultanitas Aktivisme Institusional, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Utang dalam Mengurangi Konflik Keagenan". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Naila Karima. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". No.02.
- Nilasari Senja. 2014. *Manajemen Stratgei Itu Gampang*. Jakarta. Dunia Cerdas
- Rizky Ardianto, Emrinaldi Nur DP, Nur Azlina. 2014. "Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden, Resiko Bisnis, Kontrol Kepemilikan, Cash Holding

- dan Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Jom Fekon. Vol 1. No. 2
- Rustiarini. 2011. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1. Hal: 104-119.
- Scott, W. R. 2012. *Financial Accounting Theory 6th edition*. Toronto: Pearson Education Canada
- Sembiring, 2005. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta”. Paper Presented at the Seminar Nasional Akuntansi. Solo.
- Simon, S.M. Ho, dan Wong. 200. “A Study of Relationship Between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure”. Journal of International Accounting Auditing and Taxatio. ELSEVIER. Hal. 139-156
- Slamet Haryono. 2005. “Struktur Kepemilikan dalam Bingkai Teori Keagenan”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 5. No. 1. Hal 63-71.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan. 2007. “Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 9. No.1.
- Tarjo. 2008. “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta *Cost of Equity Capital*”. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Teddy Jurnal. 2015. “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Journal Accounting and Management Research. Vol. 11 No.2.
- Tribunnews. 2018. Warga Waswas Keberadaan Limbah B3, PT Toba Pulp Lestari (TPL) Beri Penjelasan Begini. 6 Maret 2018. <http://medan.tribunnews.com/2018/03/06/warga-waswas-keberadaan-limbah-b3-pt-toba-pulp-lestari-tpl-beri-penjelasan-begini>.
- Wahidahwati. 2002. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5. No.1
- Wahyu Widarjo. 2010. Pengaruh Ownership Retention, Investasi Dari Proceeds, Dan Reputasi Auditor Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Dan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi XIII